

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Kita sepakat bahwa pendidikan merupakan sesuatu yang tidak asing bagi kita, terlebih lagi karena kita bergerak di bidang pendidikan. Juga pasti kita sepakat bahwa pendidikan diperlukan oleh semua orang. Bahkan dapat dikatakan bahwa pendidikan ini dialami oleh semua manusia dari semua golongan. Salah satu masalah pendidikan yang kita hadapi dewasa ini adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan khususnya pendidikan dasar dan menengah. Berbagai usaha telah dilakukan, antara lain melalui berbagai pelatihan dan peningkatan kualifikasi guru, penyediaan dan perbaikan sarana/prasarana pendidikan, serta peningkatan mutu manajemen sekolah. (Gunawan, 2000).

Namun demikian, berbagai indikator mutu pendidikan belum menunjukkan peningkatan yang merata. Sebagaimana sekolah, terutama di kota-kota, menunjukkan peningkatan mutu yang cukup menggembirakan, namun sebagian lainnya masih memprihatinkan. Peningkatan mutu pendidikan secara mikro sangat ditentukan oleh operasional manajemen di tingkat sekolah. Pembangunan pendidikan nasional merupakan upaya bersama seluruh komponen pemerintah maupun masyarakat. Pendidikan dapat melahirkan insan-insan terpelajar yang mempunyai peranan penting dalam transformasi sosial dalam masyarakat. (Trianto, 2010).

Peran utama dalam menjalankan pola manajemen sekolah terletak pada kepala sekolah dan seluruh komunitas sekolah, baik secara bersama-sama maupun individu. Kepala sekolah adalah orang yang bertanggungjawab untuk menjalankan roda organisasi sekolah.

Menyikapi tentang peran, fungsi dan bertanggungjawab kepala sekolah hendaknya memiliki komitmen yang tinggi atas pekerjaannya disamping profesional dan berdedikasi. kepala sekolah dituntut untuk terlibat aktif dalam proses pengembangan seluruh personil sekolah. Sebagai pemimpin di sekolah, kepala sekolah merupakan individu yang dituntut mampu melakukan transformasi kemampuannya melalui bimbingan, tuntunan dan pemberdayaan kepada seluruh warga sekolah (Purwanti, Murniati dan Yusrizal, 2014: 391).

Kepala sekolah memegang suatu peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi dan mengarahkan semua personil sekolah yang ada, Agar dapat bekerja sama dalam suatu usaha pencapaian tujuan organisasi sekolah. Tidak kalah pentingnya adalah produktivitas organisasi sekolah sebagaimana yang tampak dalam bentuk efektivitas dan efisiensi pengelolaannya serta kualitas dan kuantitas dari lulusannya, banyak ditentukan oleh adanya suatu kedisiplinan kerja yang tinggi dalam “penampilan kerja atau kinerja” (work performance) dari para personil sekolah. Kinerja guru-guru dalam suatu wujud pelaksanaan tugas mendidik dan mengajar para peserta didiknya, sangat banyak juga ditentukan atau dipengaruhi oleh adanya motivasi kerja mereka. Perilaku kepemimpinan yang efektif dari kepala sekolah sangat menentukan atau sangat mempengaruhi kinerja guru-guru. (Hendyat dan Wasty, 1984).

Kepala sekolah sebagai pimpinan sekolah memiliki tugas yang sangat berat. Standar kompetensi kepala sekolah/madrasah (BNSP, 2007: 9) menyebutkan kompetensi yang harus dimiliki kepala sekolah meliputi kepribadian, keterampilan sosial (sosialisasi kebijakan, mengarahkan hubungan) manajemen pendidikan (memiliki kebijakan-kebijakan tertentu dalam kepemimpinan dan manajemennya), dan kompetensi profesionalitas (mengelolaperencanaan sekolah, kelembagaan sekolah, mengarahkan tenaga pendidikan, mengatur hubungan sekolah-masyarakat, menguasai sistem laporan dan administrasi sekolah, mengembangkan kurikulum, melatih jiwa kewirausahaan, melakukan supervisi, melakukan

evaluasi, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), serta menciptakan budaya dan iklim kerja yang sehat. Tugas dan kewenangan kepala sekolah tersebut harus dapat dijalankan secara seimbang, sesuai kurikulum yang ditentukan pemerintah, dan sesuai kebutuhan sekolah. (Hardiyanto dan Subiyanto, 2003).

Kepala sekolah harus memiliki visi dan misi, serta strategi manajemen pendidikan secara utuh dan berorientasi kepada mutu. Strategi ini dikenal dengan manajemen mutu terpadu (MMT) , yang telah populer dalam dunia bisnis dan industri dengan istilah Total Quality manajemen (TQM). Strategi ini merupakan usaha sistematis dan terkoordinasi untuk secara terus-menerus memperbaiki kualitas layanan, sehingga fokusnya diarahkan kepelanggan dalam hal ini peserta didik, orang tua peserta didik, pemakai lulusan, guru, karyawan, pemerintah dan masyarakat. Sedikitnya terdapat lima sifat layanan yang harus diwujudkan oleh kepala sekolah agar pelanggan puas: yakni layanan sesuai dengan yang dijanjikan (*reability*), mampu menjamin kualitas pembelajaran (*assurance*), iklim sekolah yang kondusif (*tangible*), memberikan perhatian penuh kepada peserta didik (*emphaty*), cepat tanggap terhadap kebutuhan peserta didik *responsiveness* (Mulyasa, 2004).

Di Kabupaten Gorontalo Kecamatan Telaga Desa Bulila terdapat sekolah SMP Negeri 1 Telaga yang di buka oleh pemerintah pada tahun 1952 yang menjadi pusat kegiatan pembelajaran masyarakat di kecamatan telaga khususnya pelajar yang melanjutkan ke bangku SMP(Sekolah Menengah Pertama). Sampai dengan hari ini sekolah tersebut masih digunakan menjadi tempat untuk mendapatkan pendidikan guna untuk mewujudkan cita-cita bangsa dalam hal ini mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan memasuki usia 63 tahun, sekolah SMP Negeri 1 Telaga telah mengalami banyak perubahan dan kemajuan diantaranya, jumlah siswa dari tahun ke tahun semakin bertambah secara kuantitas, pembangunan gedung sekolah sudah bertambah banyak, fasilitas sekolah sudah memadai, telah banyak prestasi sekolah yang di raih dan telah terakreditasi A secara nasional. Namun masih ada kekurangan di

tengah-tengah kemajuan sekolah yakni sekolah tersebut memiliki tenaga guru dengan secara keseluruhan adalah 45 guru, 4 diantaranya adalah guru PPKn. Bila ditinjau dari segi kuantitas tenaga guru di sekolah itu memang terbilang cukup banyak, akan tetapi terdapat kekurangan dalam hal ini meminimalisir waktu jam pelajaran, jam pelajaran di sekolah SMP Negeri 1 Telaga sangatlah padat karena jata yang dimiliki oleh setiap guru untuk mengajar yaitu 24 jam dalam seminggu melihat banyaknya kelas yang diajar. Sehingga guru-guru di sekolah tersebut sangat sulit dan kelabakan dalam meminimalisir jam pelajaran khususnya guru PPKn yang hanya berjumlah 4 orang guru. Tentu saja ini menjadi keluhan guru-guru yang berada di SMP Negeri 1 Telaga khususnya guru PPKn dan bahkan menjadi kendala besar dalam hal ini mengurangi kinerja dari pada guru-guru terutama guru PPKn, karena dengan padatnya jam pelajaran guru-guru tidak merasa leluasa dalam mengerjakan tugas tambahan yang ada di sekolah, bahkan guru-guru PPKn pun sangat sulit dalam membagi waktu untuk mengerjakan tugas yang lain diberikan oleh sekolah mengingat jam pelajaran di sekolah sangatlah padat. Bahkan guru-guru di sekolah khususnya guru PPKn tidak merasa puas dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai tenaga pendidik yang profesional, dan hasilnya juga tidak maksimal seperti yang di harapkan oleh pihak sekolah terkait padatnya jam pelajaran.

Berdasarkan hasil observasi awal bahwa di SMP Negeri 1 Telaga terdapat 26 kelas secara keseluruhan yakni diantaranya kelas VII berjumlah 10 kelas, kelas VIII berjumlah 8 kelas, dan kelas IX berjumlah 8 kelas. Sehingga jika di kalikan dengan 3 jam pelajaran (1 x pertemuan) akan menghasilkan 78 jam pelajaran. Kemudian dari 78 jam pelajaran di bagi dengan jumlah 4 orang guru PPKn menghasilkan 19.5 jam pelajaran, jadi untuk mencapai 24 jam pelajaran dalam seminggu selisih yang harus dibutuhkan yakni 4.5 jam pelajaran. Namun yang menjadi pembahasan masalah dalam hal ini lebih pada pengurangan jam pelajaran yang dianggap terlalu padat oleh guru PPKn dapat mengakibatkan menurunnya kinerja guru dalam proses pembelajaran. Karena dilihat dari segi kuantitas guru PPKn hanya berjumlah 4 orang

guru, sementara kelas yang diajar berjumlah 26 kelas, maka sudah dapat diketahui bahwa guru PPKn sangat merasa kewalahan dan kelabakan mengurus jumlah kelas yang sangat banyak, belum lagi ditambah dengan urusan maupun tugas tambahan yang diberikan oleh sekolah kepada masing-masing guru PPKn.

Sementara itu dalam konsep Pendidikan, sangat memberikan kesempatan kepada kepala sekolah untuk mengurus sekolahnya dalam menjalankan kegiatan agar supaya mendukung tercapainya tujuan pendidikan, sehingga tugas dan tanggung jawabnya bertambah berat sesuai dengan kewenangan yang bertambah pula. Hal ini dapat dicermati dengan kewenangan yang diberikan untuk merencanakan dan melaksanakan tanggung jawabnya terhadap sekolah dengan tujuan untuk meningkatkan kepuasan kerja guru-gurunya, dan untuk merealisasikan tujuan tersebut juga diberikan kewenangan untuk mengolah keterampilan dan sikap profesionalisme guru-guru yang ada di sekolahnya, dalam rangka meningkatkan kinerja guru khususnya guru PPKn. Maka menjadi guru yang berkualitas adalah guru yang mampu membuat perangkat pembelajaran, mampu mengembangkan dirinya sendiri atau mengikuti perkembangan dunia pendidikan agar tidak ketinggalan informasi serta menguasai materi ajar sesuai dengan bidang yang digelutinya. Untuk menjadi guru harus memiliki kualifikasi atau kompetensi tertentu.

Untuk itu kepala sekolah pada umumnya harus lebih jeli memahami serta mengkaji lebih dalam soal kewenangan dan tanggung jawabnya, sebagaimana dalam konsep Pendidikan bahwa kepala sekolah sebagai administrator pendidikan harus mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh untuk menyelenggarakan seluruh kegiatan pendidikan dalam lingkungan sekolah yang dipimpinnya dengan dasar pancasila dan bertujuan untuk:

- Meningkatkan ketakwaan terhadap tuhan yang maha esa.
- Meningkatkan kecerdasan dan keterampilan.
- Mempertinggi budi pekerti.

- Memperkuat kepribadian.
- Mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air.

Kepala sekolah tidak hanya bertanggung jawab atas kelancaran jalannya sekolah secara teknis akademis saja, akan tetapi segala kegiatan, keadaan lingkungan sekolah dengan kondisi dan situasinya serta hubungan dengan masyarakat sekitarnya merupakan tanggung jawabnya pula serta pokok-pokok pelaksanaannya yang masih terbilang tidak beraturan bahkan terindikasi mempersulit ruang gerak guru-gurunya dalam mengerjakan tugas-tugas tambahan yang ada di sekolah. Seharusnya kepala sekolah harus bekerja sama dengan para guru yang dipimpinnya agar supaya tujuan pendidikan bisa tercapai tanpa ada kontradiksi antara kepala sekolah dan para guru yang dipimpinnya. Tetapi pada kenyataannya peran, sikap dan kebijakannya tidak berpihak pada para guru selaku bawahannya. Olehnya itu berdasarkan penjelasan di atas, penulis mengadakan penelitian dengan judul “ **Peran Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kinerja Guru PPKn** ” (Studi Kasus, SMP Negeri 1 Telaga, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan latar belakang di atas, maka penulis dapat menarik beberapa permasalahan sebagai berikut ;

1. Bagaimana peran kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja Guru PPKn?
2. Faktor-faktor apa yang menjadi kendala kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja Guru PPKn?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja Guru PPKn.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menjadi penghambat Kepala Sekolah dalam meningkatkan kinerja Guru PPKn.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Sebagai wahana pembelajaran bagi mahasiswa dalam memahami peran Kepala Sekolah khususnya dalam Meningkatkan kinerja Guru yang ada di sekolah.
2. Mengajarkan kepada Kepala Sekolah bahwa peran dan tanggung jawab sebagai Pemimpin Sekolah itu harus di terapkan di lingkungan sekolah terutama kepada para guru yang dipimpinnya.
3. Pengejawantahan dari salah satu tri dharma perguruan tinggi.